Equity: Jurnal Ekonomi
Vol. 8 (1): Juni 2020
Diterima: 2-6-2020; Disetujui: 17-6-2020
p-ISSN: 1978-3795; e-ISSN: 2721-6721

KOMPARASI PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN BELANJA DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Puput Saddiyah[1]*, Devi Valeriani[2]

[1] Mahasiswa Prodi ekonomi Univesitas Bangka Belitung
[2] Dosen Prodi Ekonomi Universitas Bangka Belitung
*** Email: puputsaddiyah26@gmail.com**

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Komparasi Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan komparatif Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung (Kanwil DJPb) dan jurnal sebagai pendukung dalam penelitian ini, selama kurun waktu 2015-2018. Teknis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dengan menggunakan tabel dan grafik dan analisis komparasi menggunakan uji statistik *One Way Anova*. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2015-2018 berfluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan. PAD rata-rata tertinggi diduduki Belitung yaitu sebesar 21,9 persen dari total PAD, Dana Alokasi Umum (DAU) rata-rata tertinggi diduduki oleh Kabupaten Bangka sebesar 16,4 persen dari total DAU, dan Belanja Daerah rata-rata tertinggi diduduki oleh Kabupaten Bangka sebesar 18,5 persen dari total Belanja Daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Alokasi Umum (DAU); Belanja Daerah

1. PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 7 (tujuh) pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Pendapatan Asli daerah (PAD) selama tahun 2015-2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengalami peningkatan. PAD tahun 2015-2016 meningkat 3,69 persen, PAD tahun 2015-2017 meningkat 22,7 persen, dan PAD tahun 2015-2018 meningkat 34,4 persen. Pendapatan Asli Daerah tertinggi berada pada tahun 2018 di Kabupaten Belitung (Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, 2019).

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana

pertimbangan dari pemerintah yang mengalokasikannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Tujuan dari Dana Alokasi Umum tersebut sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. DAU tahun 2015-2016 meningkat 5,6 persen, DAU tahun 2015-2017 meningkat 6,5 persen, dan DAU tahun 2015-2018 meningkat 8,3 persen, sehingga Dana Alokasi Umum tertinggi berada pada tahun 2018 di Kabupaten Bangka (Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, 2019).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja pemerintah daerah selain digunakan untuk membiayai urusan wajib terkait dengan hak dan pelayanan dasar, juga digunakan untuk membiayai urusan pilihan atau urusan yang sesuai dengan kekhasan dan potensi unggulan daerah. Belanja Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015-2018 berfluktuasi. Belanja Daerah Tahun 2015-2016 meningkat 12,5 persen, Belanja Daerah tahun 2015-2017 menurun 23,5 persen, dan Belanja Daerah tahun 2015-2018 meningkat 10 persen. Rata-rata Belanja Daerah tertinggi berada pada tahun 2017 di Kabupaten Bangka (Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, 2019).

Penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2018 meningkat, sedangkan Belanja Daerah mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja daerah juga akan mengalami suatu peningkatan (Tambunan dalam Devita et al. 2014).

Terkait dengan dana perimbangan (transfer pemerintah pusat), Mulyadi et al. (2010) dalam penelitiannya yang berjudul *The Analisys of Effect General Allocation Fund* (DAU) *and District Original Income* (PAD) *for Cost District Regency/City in* Bengkulu mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang "Komparasi Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun" untuk melihat sejauh mana perkembangan APBD dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan selanjutnya dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah dengan perumusan masalah "Bagaimana Komparasi dan Perkembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen

kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan, 2002).

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Prasetyaningsih (2011) Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu di bayar kembali oleh daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Halim dalam penelian Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi yang baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

2.3 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalokasikannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah.

Definisi Dana Alokasi Umum (DAU) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ”Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Sementara menurut Darise dalam penelitian Suryana (2018) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari APBN atas implementasi kebijakan pemerintah pusat terkait dengan desentralisasi yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan diantara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Harahap (2017) mengatakan DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuha daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

2.4 Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

3. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan komparatif. Menurut Sugiyono (2013) yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan keadaan satu atau lebih variabel secara mandiri sedangkan komparatif adalah membandingkan nilai satu atau lebih variabel secara mandiri pada dua atau lebih populasi, sampel atau waktu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan dan dianalisis menggunakan teknis perhitungan matematika atau statistika. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, buku-buku, jurnal, internet, dan sumber data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Teknis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis komparatif. Dawan (2019) mengatakan bahwa analisa deskriptif disebut juga dengan statistika deskriptif karena jenis datanya bersifat kuantitatif. Statistika deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penyajian tabel dan grafik. Menurut Puji (2013) penelitian komparasi penelitian yang bersifat membandingkan, dikatakan perbandingan karena adakah persamaan atau perbedaan sebab maupun akibat dari suatu masalah. Alat analisis komparasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *softwere IBM SPSS* dengan pengujian statistik *One Way Anova*.

Untuk memperoleh perbandingan maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut.

a. Rumus Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-2018

$$\%\text{PAD} = \frac{\sum \text{PAD daerah x}}{\sum \text{PAD total daerah}}$$

b. Rumus Persentase Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2015-2018

$$\%\text{DAU} = \frac{\sum \text{DAU daerah x}}{\sum \text{DAU total daerah}}$$

c. Rumus Persentase Belanja Daerah tahun 2015-2018

$$\%\text{Belanja Daerah} = \frac{\sum \text{Belanja Daerah x}}{\sum \text{Belanja Daerah total daerah}}$$

Nilai persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah digunakan untuk melihat Komparasi PAD, DAU dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.1 Kerangka Berpikir

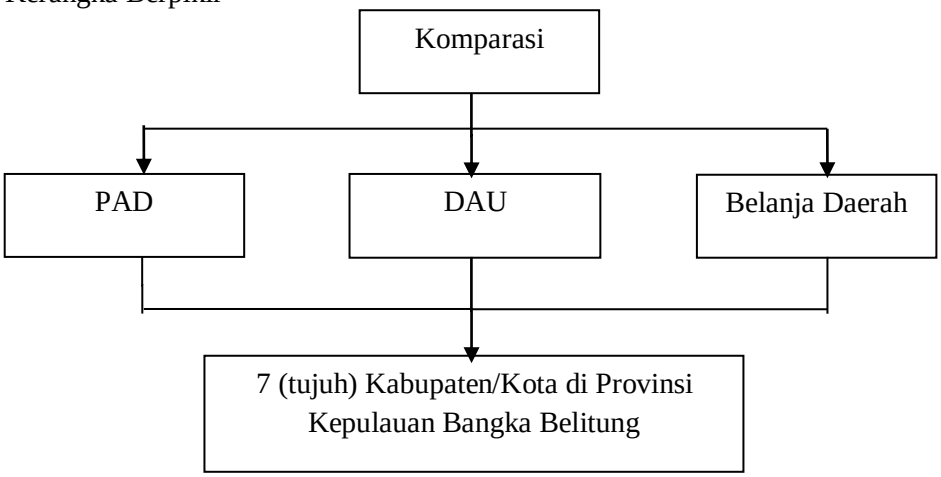

Gambar 1 Kerangka Konseptual
Sumber : data diolah peneliti, 2019

Berdasarkan gambar 1 kemadirian suatu daerah dalam mengatur otonomi daerah dapat dilihat berdasarkan komparasi dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah, sehingga dengan melakukan komparasi dapat diketahui ada perbedaan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Devita et. al (2014) mengatakan bahwa PAD dan DAU memiliki hubungan yang positif. Jika PAD meningkat maka akan meningkatkan Belanja selanjutnya Belanja Daerah meningkat maka akan meningkatkan DAU.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Uji Asumsi Komparatif

Tabel 1. Uji Normalitas

	wilayah	Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.
PAD	kabupaten belitung	.852	4	.232
	kabupaten belitung timur	.927	4	.557
	kabupaten bangka	.894	4	.403
	kabupaten bangka tengah	.991	4	.964
	kabupaten bangka selatan	.863	4	.271
	kota pangkalpinang	.977	4	.885
	kabupaten bangka barat	.956	4	.754
DAU	kabupaten belitung	.820	4	.143
	kabupaten belitung timur	.813	4	.128
	kabupaten bangka	.844	4	.209
	kabupaten bangka tengah	.949	4	.713
	kabupaten bangka selatan	.747	4	.036
	kota pangkalpinang	.857	4	.250
	kabupaten bangka barat	.879	4	.335
BD	kabupaten belitung	.852	4	.232
	kabupaten belitung timur	.927	4	.577
	kabupaten bangka	.894	4	.403
	kabupaten bangka tengah	.991	4	.964
	kabupaten bangka selatan	.863	4	.271
	kota pangkalpinang	.977	4	.885
	kabupaten bangka barat	.876	3	.754

Sumber : Data diolah peneliti, 2020

Tabel 1 menunjukkan hasil uji normalitas sebagai syarat asumsi pengujian komparatif. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas yaitu dengan uji *Shapiro Wilk*. Adapun kriteria uji *Shapiro Wilk* apabila signifikansi *Shapiro Wilk* > 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dilihat dari Tabel 1 maka rata-rata signifikansi PAD, DAU dan Belanja Daerah > 0,05, hal ini menunjukkkan bahwa data tersebut normal, sehingga syarat uji normalitas sudah terpenuhi.

Tabel 2. Uji Homogenitas

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
PAD	2.884	6	21	.033
DAU	1.172	6	21	.358
BD	.133	6	21	.990

Sumber : Data diolah peneliti, 2020

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu varians (keberagaman) data dari dua atau lebih kelompok bersifat homogen (sama) atau heterogen (tidak sama). Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas adalah apabila signifiansi uji homogenitas > 0,05, maka data tersebut homogen (sama). Berdasarkan tabel 2, signifikan DAU dan Belanja Daerah > 0,05 atau 0,358 dan 0,990 > 0,05, maka rata-rata nilai atau varians DAU dan Belanja Daerah adalah homogen (sama). Untuk varians PAD berdasarkan hasil pengeolahan uji homogenitas, maka tingkat signifikansi PAD < 0,05 atau 0,033 < 0,05, sehingga varians PAD adalah heterogen (tidak sama).

4.1.2 Hasil Uji *One Way Anova*

Tabel 3. Uji Statistik Anova (*One Way Anova*)

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
PAD	Between Groups	44323406140000000000000,000	6	7387234357000000000000,000	29,353	,000
	Within Groups	52850181800000000000000,000	21	2516675324000000000000,000		
	Total	49608424320000000000000,000	27			
DAU	Between Groups	24671618740000000000000,000	6	4111936456000000000000,000	14,131	,000
	Within Groups	61105114980000000000000,000	21	2909767380000000000000,000		
	Total	30782130240000000000000,000	27			
BD	Between Groups	24584719040000000000000,000	6	4097453173000000000000,000	2,270	,076
	Within Groups	37905133100000000000000,000	21	1805006338000000000000,000		
	Total	62489852130000000000000,000	27			

Sumber : Data diolah peneliti, 2020

Uji Anova atau analisis varians adalah untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari dua kelompok. Dasar pengambilan keputusan uji Anova adalah apabila signifikansi Anova > 0,05, maka rata-rata nilai tersebut sama, sebaliknya apabila signifikansi Anova < 0,05, maka rata-rata nilai tersebut berbeda. Berdasarkan tabel 3, PAD dan DAU memiliki

signifikansi < 0,05 atau 0,000 dan 0,000 < 0,05, hal ini berarti rata-rata nilai PAD dan DAU disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berbeda. Sedangkan Belanja Daerah memiliki signifikansi > 0,05 atau 0,076 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata belanja daerah disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sama.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perkembangan PAD, DAU dan Belanja Daerah

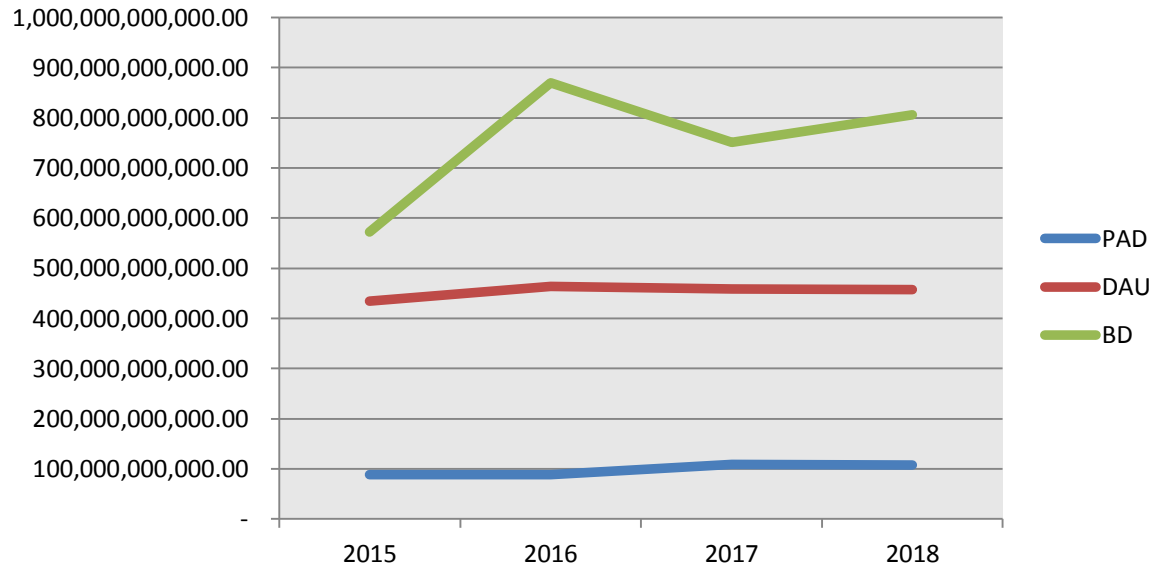

Gambar 2. Rata-Rata Perkembangan PAD, DAU dan Belanja Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepualan Tahun 2015-2018

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Gambar 2 menunjukkan rata-rata perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PAD, DAU dan Belanja Daerah dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata PAD tertinggi berada pada tahun 2017 dan wilayah yang menerima PAD tertinggi sejak kurun waktu 2015-2015 adalah Kabupaten Belitung yaitu sebesar 22 persen. Hal ini disebabkan karena tingginya pendapatan pajak daerah dengan total Rp 311.494.523.369 dan tingginya lain-lain PAD yang sah dengan total Rp 239.742.284814,22. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah dalam kurun waktu 2015-2018 terdapat di Kabupaten Bangka Selatan yaitu sebesar 7 persen. Hal ini disebabkan Kabupaten Bangka Selatan memiliki total pendapatan pajak daerah terendah dengan total Rp 79.723.406.723. Dibandingkan dengan Kabupaten Belitung memiliki selisih total Rp 231.771.116.645,82. Komponen PAD selain pendapatan pajak yang rendah, Penerimaan lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Bangka Selatan juga terendah dengan total sebesar Rp 70.112.003.640. Dibandingkan dengan Kabupaten Belitung memiliki selisih total sebesar Rp 169.630.281.174,22.

Rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada tahun 2016 yaitu rata-ratanya sebesar Rp 464.221.353.143,00, sedangkan daerah yang paling banyak menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah Pusat adalah Kabupaten Bangka yaitu sebesar 16 persen dari total DAU. Tingginya DAU di Kabupaten Bangka karena Kabupaten Bangka merupakan wilayah

terluas kedua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sekitar 2.950,68 KM^2, sehingga Kabupaten Bangka membutuhkan dana alokasi umum yang lebih untuk membiayai kebutuhan pengeluaran atau belanja daerahnya. Kabupaten Bangka memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sekitar 312.460 jiwa sehingga DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat ditambah 5 persen untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya. Rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) terendah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terdapat di Belitung Timur yaitu sebesar 13 persen dari total DAU. Berdasarkan perhitungan DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yaitu dilihat dari banyaknya jumlah penduduk. Belitung Timur memiliki jumlah penduduk terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya yaitu hanya 119.807 jiwa, sehingga DAU untuk Belitung Timur sendiri tidak perlu ditambah 5 persen oleh pemerintah pusat.

Belanja daerah tertinggi selama kurun waktu 2015-2018 adalah Kabupaten Bangka yaitu sebesar 19 persen dari total belanja daerah. Tingginya belanja daerah di Kabupaten Bangka akibat dari besarnya realisasi belanja tidak langsung yaitu Rp 546,76 miliar dengan pangsa pasar 50,01 persen dari total belanja daerah pada tahun 2016. Realisasi belanja langsung di Kabupaten Bangka mencapai Rp 546,41 miliar atau 49,98 persen dari total belanja daerah. Bangka Barat merupakan kabupaten yang mengeluarkan anggaran belanja terendah yaitu 10 persen dari total belanja daerah selama kurun waktu 2015-2018. Hal ini disebabkan pembangunan daerah di Bangka Barat dalam proses pencapaian target, sehingga anggaran yang digunakan tidak sebanyak kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bangka Belitung.

5. KESIMPULAN

Hasil uji analisis statistik dengan menggunakan *One Way Anova*, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun 2015-2018 memiliki rata-rata yang berbeda di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai signifikansi masing-masing 0,000 dan 0,000 < 0,05, sedangkan Belanja Daerah di setiap Kabupaten/Kota memiliki rata-rata yang sama dengan nilai signifikansi 0,076 > 0,05.

Perkembangan PAD, DAU dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Belitung, Belitung Timur, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Pangkalpinang dan Bangka Barat dalam kurun waktu 2015-2018 berfluktuatif, namun cenderung meningkat. PAD rata-rata tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2015-2018, sedangkan PAD terendah terdapat di Kabupaten Bangka Selatan. DAU rata-rata tertinggi dipegang oleh Kabupaten Bangka selama tahun 2015-2018 dan DAU terendah dipegang oleh Belitung Timur. Rata-rata Belanja Daerah tertinggi tahun 2015-2018 dipegang oleh Kabupaten Bangka, sedangkan daerah terendah yaitu Bangka Barat.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah maka pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan alokasi belanja daerah agar bisa menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun eksentifikasi. Pemerintah daerah juga harus terus berupaya menarik Dana Alokasi Umum untuk dialokasikan pada sektor publik agar penggunaannya menjadi efisien dan menjadi penerimaan daerah. Agar penggunaan belanja daerah lebih produktif maka pemerintah daerah sebaliknya lebih transparan dalam mempergunakan belanja daerah tersebut sehingga memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanawata a'la, kemudian saya sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah menyemangati dan selalu mendukung saya. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktik (KKP) saya yaitu ibu Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si yang telah banyak membantu dalam membuat laporan KKP, terima kasih kepada Pemimpin Instansi Direktorat Jenderal Perbendaraan (DJPB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pembimbing Lapangan saya bapak Suhartono yang banyak memberi materi serta pelajaran yang banyak mengenai pekerjaan-pekerjaan selama dalam KKP, terima kasih kepada penguji saya yang telah banyak memberi arahan dan masukkan yang baik.

REFERENSI

Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Pajak*. Malang: UB Press.

Arwati, D, & Novita. H. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Ekonomi Universitas Widyatama Bandung : halaman 498-507.

Asari, N.M.A, dan Ketut Alit Suardana. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah*. Jurnal Akuntansi Unud. Volume 25, Nomor 2, November 2018: halaman 877-904

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. 2013. *Hukum Pajak Material dan Formil*.http://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/12494-hukum-pajak-materil-danformil. [Diakses 13 Mei 2013].

Bank Indonesia. 2017 *Kajian Ekonomi & Keuangan Regional November 2011*Dawan. 2019. *Penjelasan Teknis Analisa Data Kuantitatif dan Kualitatif.* http://ngertiaja.com/teknis-analisa-data/ [Diakses 05 April 2019]

Devita, A. dkk. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal Ekonomi UNJA. Volume 2, Nomor 2, Oktober-Desember 2014: halaman 63-68.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. 2018. *Kajian Fiskal Regional Tahun 2018.*

Efizudin, A. 2018. *Pariwisata Dongkrak Perekonomisn dan PAD Belitung.* <http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181021181414-269-340218/pariwisata-dongkrak-perekonomian-dan-pad-belitung> [Diakses 21 Oktober 2018].

Erwin. 2011. *Definisi Unsur, dan Fungsi Pajak.* http://erwinnote.wordpress.com/2011/11/20/definisi- unsur-dan-fungsi-pajak/ [Diakses 20 November 2011].

Finanda, K. 2016 *Prinsip-Prinsip & Kebijakan dalam Penyusunan APBD,* <https://khalilfinanda.blogspot.com/2016/05/prinsip-prinsip-dan-kebijakan dalam.html> [Diakses 02 Mei 2016].

Harahap, R.U. 2017. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Untara*. Jurnal Ekonomi USU. Volume 1, Nomor 2, 1 Januari- Juni 2017: halaman 118-127.

Irvan. 2012. *Teori-Teori Pendukung Pemungutan Pajak*. <http://ndeso-go-blog.blogspot.com/2012/03/teori-teori-pendukung-pemungutan-pajak.html?m=1>. [diakses 30 Maret 2012]

Lestari, T.P. 2013. *Penelitian Komparatif*. http://lestarysnote.blogspot.com/2013/10/penelitian-komparatif.ht ml?m=1 [Diakses Oktober 2019].

Mawarni. dkk. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Aceh).* Jurnal Akuntansi Unsyiah Kuala. Volume 2, Nomor 2, Mei 2013, halaman 80-90.

Mulyadi, H. dkk. 2010. *The Analysis of Effect General Allocation Fund (DAU) and District Original (PAD) for Cost District Regency/City in Bengkulu*. Jurnal Ekonomi & Perencanaan Pembangunan Universitas Bengkulu. Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2010: halaman 51-58

Nadir, S. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik Unhas Makassar. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013.

Nisa, A. A. 2017. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Ekonomi UMM. Volume 1, Jilid 2, Tahun 2017: halaman 203-214.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Dana Alokasi umum

_____,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

_____,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

_____,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Belanja Daerah.

_____,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penerimaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Prasetyaningsih, T. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* [Tesis]. Bangka Belitung (ID): Universitas Terbuka.

Reiny. 2012. *Pajak*. < http://3yoo.wordpress.com/2012/07/22/pajak/> [Diakses 22 Juli 2012]

Sakti, Z. 2015. *Pengertian Pajak dan Retribusi Serta Cirinya Lengkap*. http://www.awalilmu.com/2015/02/pengertian-pajak-dan-retribusi-serta-cirinya-lengkap.html?m=1 [Diakses Oktober 2019].

Sani, A. 2018. *Otonomi Daerah Esensi, Tujuan dan Manfaatnya bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*<http://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung> [Diakses 18 Juni 2017].

Sari, D.A. 2013. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Boyolali*. Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyono. 2013. *Cara Mudah Menyusun: SKRIPSI, TESIS, dan DISERTASI*. April Nuryanto, editor. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sofia Yustiani S, editor. Bandung: Alfabeta

Suryana. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis Universitas Widyatama. Volume 9, Nomor 9, September 2018: halaman 67-74.

_____, *Analisis Data Komparatif (Anova).* http://www.slideshare.net/mobile/jenkelana/p11analisis-komparatif-anova-di-spss. [Di akses 15 Juni 2020]